

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 140

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 140 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dserah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah:
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan

- Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan
 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111
 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
 Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah
 Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Kekurangan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan.

Pasal 2

Besamya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besamya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal luntuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWATENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 140 LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 140 TAHUN 2008 TANGGAL 3 NOPEMNER 2008

ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008

NO KABUPATEN/KOTA				
KABUPATEN :	NO	KABUPATEN/KOTA		KETERANGAN
1 SEMARANG 45.974.769,18 2 KENDAL 14.079,916,04 3 DEMAK 28.787.898,51 4 GROBOGAN 28.195.062,77 5 PATI 12.463.012,17 6 K U D U S 12.303.317,96 7 J E PARA 19.057.162,55 8 REMBANG 66.848.019,04 9 B L O RA 21.586.867,94 10 PEKALONGAN 12.316.625,81 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 KEBUMEN 13.148.366,49 <td>1</td> <td>2</td> <td>3,</td> <td>4</td>	1	2	3,	4
2 KENDAL 14.079.916,04 3 DEMAK 28.787.898,51 4 GROBOGAN 28.195.062,77 5 PATI 12.463.012,17 6 KUDUS 12.303.317,96 7 JEPARA 19.057.162,55 8 REMBANG 66.848.019,04 9 BLORA 21.586.867,94 10 PEKALONGAN 12.316.625,81 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70		KABUPATEN:	•	
3 DEMAK 4 GROBOGAN 28.195.062,777 5 PATI 6 KUDUS 7 JEPARA 8 REMBANG 9 BLORA 10 PEKALONGAN 11 BATANG 11 BATANG 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 14 BREBES 15 BANYUMAS 16 CILACAP 17 PURBALINGGA 18 BANJARNEGARA 19.057.691,24 10 PEKBLORGA 10 PEKALONGAN 10 PEKALONGAN 10 PEKALONGAN 10 PEKALONGAN 10 PEKALONGAN 11 PEMALANG 11 PEMALANG 12 PEMALANG 13.181.636,11 14 BREBES 15 BANYUMAS 16 CILACAP 17 PURBALINGGA 18 BANJARNEGARA 19 PURBALINGGA 11 PURBALINGGA 11 PURBALINGGA 11 PURBALINGGA 12 PURBALINGGA 13 PURBALINGGA 14 PURBALINGGA 14 PURBALINGGA 15 PURBALINGGA 16 PURBALINGGA 16 PURBALINGGA 17 PURBALINGGA 18 PURBALINGGA 18 PURBALINGGA 18 PURBALINGGA 18 PURBALINGGA 19 PURBALINGA 19 PURBALINGGA 19 PURB	- 1.	SEMARANG	45.974.769,18	
4 GROBOGAN 5 PATI 6 KUDUS 12.463.012,17 6 KUDUS 7 JEPARA 19.057.162,55 8 REMBANG 9 BLORA 10 PEKALONGAN 11 BATANG 11 BATANG 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 15 BANYUMAS 16 CILACAP 17 PURBALINGGA 18 BANJARNEGARA 19.057.799,92 15 BANJARNEGARA 11 BATANG 12.1586.867,94 12.1586.867,94 13.181.636,11 13.181.636,11 14 BREBES 15 BANYUMAS 16 CILACAP 17 PURBALINGGA 18 BANJARNEGARA 19.0572.799,92 19 MAGELANG 19 WONOSOBO 10 TEMANGGUNG 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 23.1437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	2	KENDAL	14.079.916,04	
5 PATI 12.463.012,17 6 KUDUS 12.303.317,96 7 JEPARA 19.057.162,55 8 REMBANG 66.848.019,04 9 BLORA 21.586.867,94 10 PEKALONGAN 12.316.625,81 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	3	DEMAK	28.787.898,51	
6 K U D U S 12.303.317,96 7 J E P A R A 19.057.162,55 8 REMBANG 66.848.019,04 9 B L O R A 21.586.867,94 10 PEKALONGAN 12.316.625,81 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	4	GROBOGAN	28.195.062,77	
7 JEPARA , 19.057.162,55 8 REMBANG 66.848.019,04 9 BLORA 21.586.867,94 10 PEKALONGAN 12.316.625,81 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	5	PATI	12.463.012,17	
8 REMBANG 9 B L O R A 21.586.867,94 10 PEKALONGAN 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 15 BANYUMAS 16 CILACAP 17 PURBALINGGA 18 BANJARNEGARA 19 MAGELANG 19 MAGELANG 20 TEMANGGUNG 21.487.143,32 21 WONOSOBO 22 PURWOREJO 24 KLATEN 21.586.867,94 21.586.8	6	KUDUS	12.303.317,96	
9 B L O R A 21.586.867,94 10 PEKALONGAN 12.316.625,81 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	7	JEPARA ,	19.057.162,55	
10 PEKALONGAN 12.316.625,81 11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 19 MAGELANG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	8	REMBANG	66.848.019,04	
11 BATANG 16.976.691,24 12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	9	BLORA	21.586.867,94	•
12 PEMALANG 13.181.636,11 13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	10	PEKALONGAN	12.316.625,81	
13 TEGAL 13.547.602,01 14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	11	BATANG	16.976.691,24	
14 BREBES 80.572.799,92 15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	12	PEMALANG	13.181.636,11	
15 BANYUMAS 24.951.486,64 16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	13	TEGAL	13.547.602,01	
16 CILACAP 27.509.084,10 17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	14	BREBES	80.572.799,92	
17 PURBALINGGA 13.787.143,32 18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	15	BANYUMAS	24.951.486,64	
18 BANJARNEGARA 13.820.412,95 19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	16	CILACAP	27.509.084,10	•
19 MAGELANG 24.060.773,48 20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	17	PURBALINGGA	13.787.143,32	
20 TEMANGGUNG 23.445.349,44 21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	18	BANJARNEGARA	13.820.412,95	
21 WONOSOBO 14.479.151,56 22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	19	MAGELANG	24.060.773,48	·
22 PURWOREJO 31.437.814,71 23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	20	TEMANGGUNG	23.445.349,44	
23 KEBUMEN 13.148.366,49 24 KLATEN 14.199.686,70	21	WONOSOBO	14.479.151,56	
24 KLATEN 14.199.686,70	22	PURWOREJO	31.437.814,71	
	23	KEBUMEN	13.148.366,49	
25 BOYOLALI 23.662.298,78	24	KLATEN	14.199.686,70	
	25	BOYOLALI	23.662.298,78	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL KELEBIHAN MUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN:		
26	SRAGEN	44.490.665,85	
27	SUKOHARJO	12.569.474,98	
28	KARANGANYAR	14.173.071,00	
29	WONOGIRI	27.958.462,78	
	KOTA:		
30	SEMARANG	32.771.295,36	
31	PEKALONGAN	9.814.749,87]
32	SURAKARTA	12.835.631,99	
33	SALATIGA	10.653,144,47	
· 34	TEGAL	10.140.792,21	
35	MAGELANG	9.528.631,08	:
	JUMLAH	795.328.869,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd BIBIT WALUYO